

## DAFTAR PUSTAKA

Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,  
*Tentang Perbendaharaan Negara.*

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004,  
Tentang *Ruang Lingkup Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Negara dalam  
Peraturan Pemerintah meliputi Penjualan Barang Melalui Pelelangan dan  
Pengecualiannya, Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Penggunaan,  
Pemanfaatan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Penilaian, Penghapusan dan  
Pemindahtanganan.*

Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan  
Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

[https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pemeliharaan-dan-atau-perawatan-  
barang-milik-negara-aset-tetap-7cc40f59/detail/](https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pemeliharaan-dan-atau-perawatan-barang-milik-negara-aset-tetap-7cc40f59/detail/)

Mamduh M.Hanafi (2003:24), *Pengertian Aktiva.*

Siregar, Doli D (2002:48), *Manjemen Aset Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi  
Pemerintah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, *Tentang Pedoman  
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 6, *Tentang Pengelolaan Barang Milik  
Negara/Daerah.*2005. *Buletin Teknis SAP Nomor 02.* Jakarta : Sekretariat  
Negara Peraturan

Peraturan Mentri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dalam  
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah